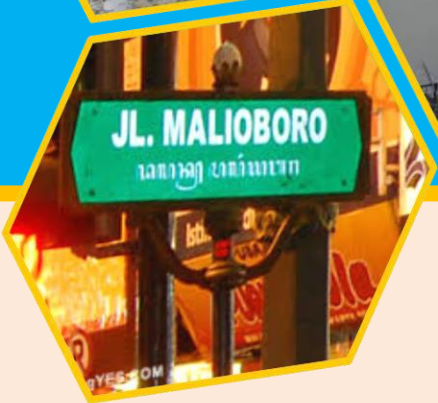




KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL

Triwulan I
2018



Penyusun:

Penanggung Jawab: Ludiro | Ketua Tim: Aris Saputro | Editor:
Marjanto/Wuri H | Desain Grafis: Enny/Agni | Anggota:
Slamet Suharno | Fitri N | Nursaida | Nanik Mardi A | Dolfina I
Indah S | Purwo W | Sukro I

**KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN**

Provinsi D.I. YOGYAKARTA

Daftar Isi

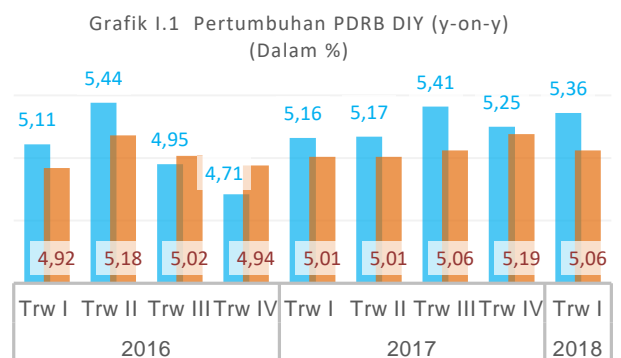
Daftar Isi	i
Bab I Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional	1
A. Produk Domestik Regional Bruto	1
B. Inflasi	1
C. Indikator Kesejahteraan	2
Bab II Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN	4
A. Pendapatan Negara	4
B. Belanja Negara	7
C. Prognosis Realisasi APBN	9
Bab III Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD	10
A. Pendapatan Daerah	11
B. Belanja Negara	15
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan akhir Tahun 2017	16
Bab IV Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian	
(APBN dan APBD)	18
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian	18
B. Pendapatan Konsolidasian	18
C. Belanja Konsolidasian	20
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam PDRB	22
Bab V Berita/Isu Regional Terpilih	24
A. Angkat Ekonomi Rakyat Melalui Pembiayaan UMi	24
B. Pengentasan Desa Rawan Pangan Menjadi Prioritas DIY	25

Lampiran

Bab I

Perkembangan dan Analisis Ekonomi Regional

A. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO



Sumber : BRS BPS DIY NO 27/05/Th.XX,7 8ei 2017

■ DIY ■ Nas

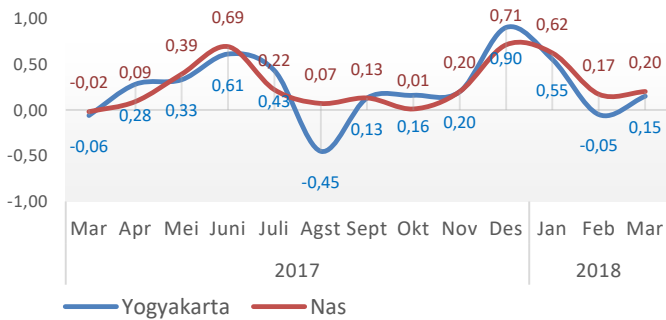
Perekonomian D.I Yogyakarta (DIY) yang diukur berdasarkan nilai PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) pada triwulan I 2018 tercatat sebesar Rp31,14 triliun. Sedangkan nilai riil PDRB atas dasar harga konstan (ADHK 2010) sebesar Rp23,67 triliun. Laju pertumbuhan PDRB pada triwulan I 2018 tumbuh 5,36 persen (y-on-y) *lebih tinggi* dibandingkan pertumbuhan pada periode triwulan I 2017 (5,16 persen).

Kinerja perekonomian DIY sepanjang triwulan I 2018 masih di bawah target pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) DIY 2018 yang sebesar 5,63 persen. Namun demikian, capaian tersebut melampaui pertumbuhan ekonomi Nasional yang tercatat 5,06 persen. Dari sisi lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi DIY sepanjang triwulan I 2018 didukung oleh seluruh lapangan usaha. Andil pertumbuhan terbesar berasal dari industri pengolahan sebesar 0,78 persen, konstruksi serta informasi dan komunikasi masing-masing 0,65 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan ekonomi digerakkan oleh semua komponen, kecuali konsumsi lembaga nonprofit. Andil pertumbuhan terbesar berasal dari konsumsi rumah tangga sebesar 3,40 persen, Pembentukan Model Tetap Bruto (PMTB) 1,87 persen dan konsumsi pemerintah 0,71 persen.

B. INFLASI

Laju inflasi tahunan (y-on-y) pada triwulan I 2018 sebesar 3,29 persen, lebih rendah dibandingkan laju inflasi nasional yang sebesar 3,40 persen. Sedangkan tingkat inflasi bulanan (m-to-m) selama triwulan I 2018 tertinggi terjadi di bulan Januari sebesar 0,55 persen. Hal ini sejalan dengan tingkat inflasi bulanan secara nasional yang juga mencapai puncaknya pada Januari 2018 (0,62 persen). Komoditas yang paling mempengaruhi inflasi di bulan tersebut adalah beras

Grafik I.2 Tingkat Inflasi Kota Yogyakarta Dan Nasional Maret 2017-Maret 2018 (m-to-m)



dengan andil 0,17 persen (naik 4,42 persen), angkutan udara dengan andil 0,09 persen (naik 0,76 persen), daging ayam ras dengan andil 0,07 persen (naik 7,18 persen), dan cabai merah dengan andil 0,03 persen (naik 16,63 persen).

Tingkat inflasi di DIY (y-on-y) sampai dengan triwulan I 2018 berada di atas asumsi inflasi Kota Yogyakarta Tahun 2018 yang diperkirakan sebesar 2,90 persen. Meski demikian, inflasi pada Triwulan I 2018 ini lebih rendah dibandingkan Triwulan IV 2017. Hal ini sejalan dengan berakhirnya libur Natal dan Tahun Baru yang terjadi pada Triwulan IV 2017 sampai dengan awal Triwulan I 2018, yang mendorong *demand* dan konsumsi masyarakat kembali normal. Selain itu, lebih rendahnya inflasi triwulan I 2018 ini juga dipengaruhi oleh rendahnya gejala inflasi *administered price* dan terjaganya *volatile food* (kelompok komoditas bahan makanan yang perkembangan harganya sangat bergejolak karena faktor-faktor tertentu) serta terkendalinya inflasi inti.

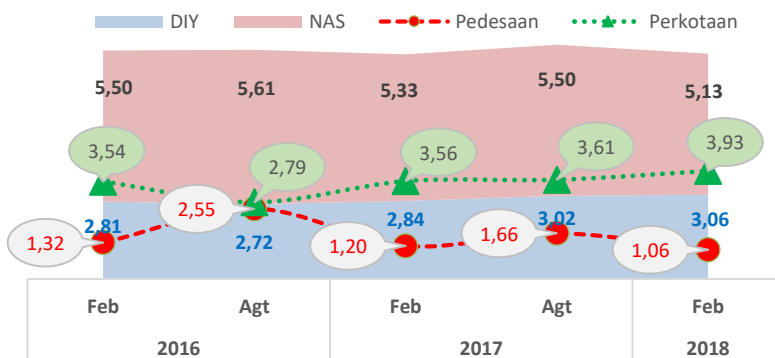
C. INDIKATOR KESEJAHTERAAN

1. Pengangguran

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di DIY pada Februari 2018 mencapai 3,06 persen, meningkat 0,22 persen dibandingkan Februari 2017. Meskipun masih dibawah angka TPT Nasional (5,13 persen), namun TPT DIY yang meningkat berbanding terbalik dengan kondisi nasional yang mengalami penurunan. Angka TPT daerah perkotaan 3,93 persen, lebih tinggi dari pedesaan. Hal tersebut

disebabkan wilayah perkotaan memiliki sektor formal yang lebih banyak dibandingkan pedesaan dan sektor formal lebih sulit dimasuki angkatan kerja untuk bekerja karena lebih banyak menuntut keahlian dibandingkan sektor informal. Dari jenjang

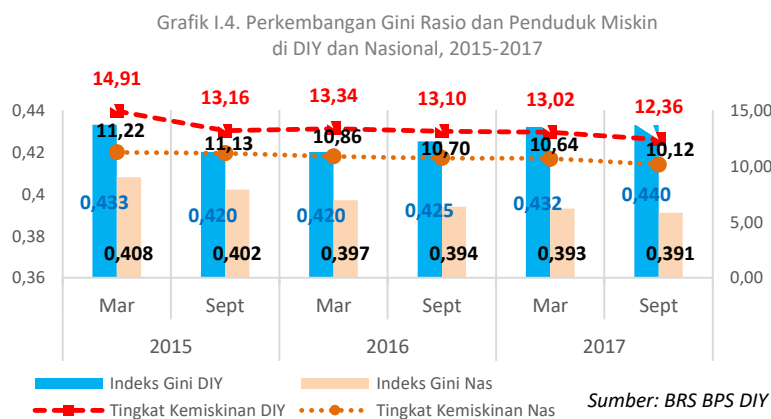
Grafik I.3. Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY, Feb 2016-Februari 2018 (Persen)



Sumber : BRS BPS DIY No.30/05/34/Th.XX, 7 Mei 2018

pendidikan, TPT tertinggi pada tingkat SMA dan SMK masing-masing 5,67 persen dan 3,23 persen.

2. Kemiskinan dan Gini Ratio



Tingkat kemiskinan di DIY pada September 2017 12,36 persen atau menurun 13,10 persen dibandingkan September 2016. Jumlah penduduk miskin di perdesaan 15,86 persen, lebih besar dibandingkan di

perkotaan (11 persen). Angka tersebut masih berada diatas rata-rata nasional (10,12 persen). Terkait tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk, angka Gini Ratio DIY periode September 2017 tercatat 0,440 atau meningkat 0,015 poin dibandingkan September 2016 dan lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Angka gini ratio di perkotaan 0,447 lebih tinggi dibandingkan perdesaan (0,317). Sama seperti periode Maret 2017, gini ratio DIY per September 2017 masih tercatat tertinggi secara nasional.

Progress Perkembangan Indikator Makro DIY s.d Triwulan I 2018

Tabel I.1 Realisasi Indikator Makro Provinsi DIY dan Nasional s.d Triwulan I 2018

No	Indikator	Target Tahunan (KUA TA 2018) ⁱ	Realisasi DIY	Realisasi Nasional
1	Pertumbuhan Ekonomi	5,63%	5,36 %	5,06 %
2	Inflasi	2,90%	3,29 %	3,40%
3	Tingkat Kemiskinan	9,45%	12,36 %	10,12 %
4	Pengangguran (TPT)	5,90 %	3,06 %	5,13 %
5	Gini Ratio	0,4499	0,440	0,391

Tak dipungkiri masalah tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan merupakan pekerjaan rumah tersendiri bagi Pemerintah Daerah DIY. Perkembangan tingkat kemiskinan selama kurun September 2015 – September 2017 menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun, namun untuk gini ratio berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Demikian juga dengan TPT periode tiga tahun terakhir (Februari 2016 – Februari 2018) cenderung meningkat.

ⁱ Berdasarkan target dan proyeksi dalam KUA Pemda DIY Tahun 2018

Bab II

Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBN

Perbandingan postur APBN 2018 dengan APBNP 2017, sebagai berikut :

Tabel II.1 Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi D.I. Yogyakarta
s.d. akhir Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam Miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA	6.861,22	1.089,40	8.047,48	1.462,98
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	6.861,22	1.089,40	8.047,48	1.462,98
1. Penerimaan Pajak	5.759,69	910,57	5.489,70	977,48
2. PNPB	1.101,53	178,83	2.557,78	485,50
II. HIBAH	-	-	-	-
B. BELANJA NEGARA	19.558,14	4.047,73	19.382,89	3.986,93
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	9.786,91	1.249,40	9.411,41	1.433,86
1. Belanja Pegawai	4.301,65	822,18	4.265,18	827,12
2. Belanja Barang	3.073,61	244,57	3.016,68	452,90
3. Belanja Modal	2.390,29	182,54	2.118,20	149,57
4. Belanja Bantuan Sosial	21,36	0,11	11,35	4,27
5. Belanja Lain-lain	-	-	-	-
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	9.771,23	2.798,33	9.971,48	2.553,07
1. Transfer ke Daerah	9.403,66	2.798,33	9.616,96	2.482,17
a. Dana Perimbangan	8.332,84	2.539,17	8.380,21	2.270,67
1) Dana Alokasi Umum (DAU)	5.670,11	1.890,04	5.595,71	1.865,24
2) Dana Bagi Hasil (DBH)	411,57	135,00	372,03	71,55
3) Dana Alokasi Khusus (DAK)	2.250,87	514,14	2.412,47	333,88
b. Dana Keistimewaan Yogyakarta	800,00	120,00	1.000,00	150,00
c. Dana Transfer Lainnya (DID)	270,82	139,16	236,75	61,50
2. Dana Desa	368,57	0	354,52	70,90
C. SURPLUS /DEFISIT	(12.696,92)	(2.958,33)	(11.335,41)	(2.523,95)

Sumber : Data Kanwil DJP DIY, Daftar Alokasi Dana Transfer Ke daerah dan dana Desa Tahun 2018, Data OM SPAN diakses tanggal 07-05-2018 dan Data Laporan Government Financial Statistics (GFS) Triwulan I Kanwil DJPb Provinsi. D.I Yogyakarta

Target pendapatan negara di DIY tahun 2018 ditetapkan Rp8,05 triliun atau lebih tinggi 17,29 persen dibandingkan APBNP 2017. Sedangkan alokasi belanja negara di DIY sebesar Rp19,38 triliun atau 0,90 persen lebih kecil dibandingkan APBNP 2017. Sampai dengan triwulan I 2018, realisasi pendapatan negara Rp1,46 triliun atau 18,18 persen dan lebih tinggi dibandingkan capaian tahun 2017 (15,88 persen). Sementara realisasi belanja Rp3,99 triliun, maka pada periode ini belanja negara di DIY mengalami defisit anggaran sebesar Rp2,52 triliun.

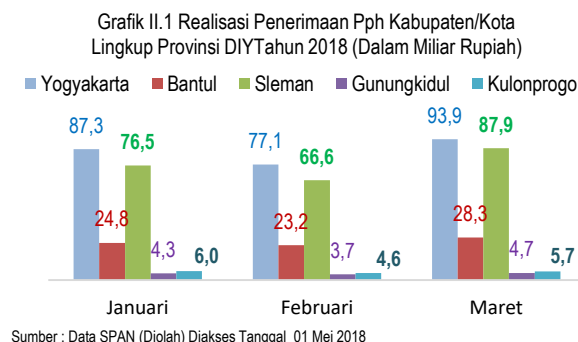
A. PENDAPATAN NEGARA

Pos pendapatan negara di wilayah DIY seluruhnya berasal dari penerimaan dalam negeri. Realisasi pendapatan dalam negeri sampai dengan triwulan I 2018 mencapai Rp1,46 triliun. Pendapatan dalam negeri tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp 977,48 milyar dan PNPB sebesar Rp485,5 miliar.

1. Penerimaan Perpajakan

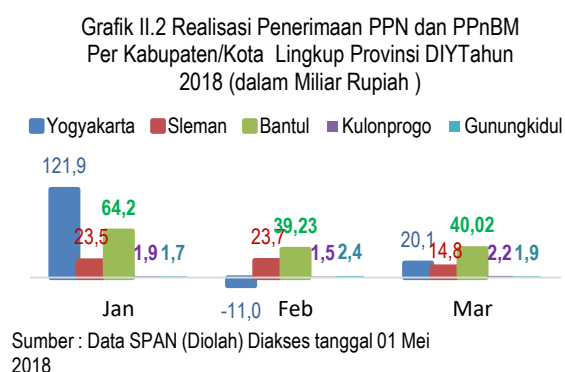
Realisasi penerimaan perpajakan sampai dengan triwulan I 2018 mencapai Rp977,48 miliar atau tercapai 17,81 persen. Capaian tersebut lebih tinggi dari capaian penerimaan pajak nasional 17,17 persen¹.

a. Pajak Penghasilan (PPh)



PPh masih menjadi kontributor utama sektor perpajakan dengan kontribusi 60,69 persen. Realisasi penerimaan PPh di DIY sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp592,37 miliar atau 16,66 persen dari target. Penerimaan PPh terbesar berasal dari Kota Yogyakarta, sebesar Rp258,32 miliar.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan PPnBM



Realisasi penerimaan PPN dan PPnBM pada triwulan I 2018 sebesar Rp348,01 miliar atau 35,66 persen terhadap total penerimaan perpajakan. Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta memiliki penerimaan tertinggi masing-masing sebesar Rp143,44 miliar dan Rp131,02 miliar.

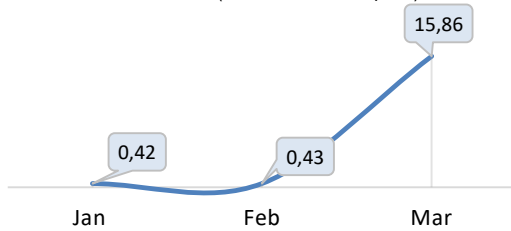
c. Penerimaan Cukai

Realisasi penerimaan cukai triwulan I 2018 mencapai Rp16,71 miliar atau 4,14 persen dari target Rp403,17 miliar. Capaian tersebut *masih dibawah* capaian penerimaan sektor cukai nasional yang tercatat 11,51 persen².

¹ Target penerimaan pajak Rp1.423,9 triliun (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3698708/target-setoran-pajak-2018-capai-rp-1423-triliun>) dan realisasi triwulan I 2018 Rp244,5 triliun (<https://bisnis.tempo.co/read/1080137/sri-mulyani-penerimaan-pajak-triwulan-i-2018-tumbuh-994-persen>)

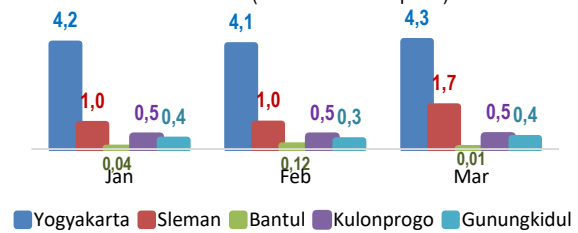
² Target penerimaan cukai Rp155,4 triliun (<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3698708/target-setoran-pajak-2018-capai-rp-1423-triliun>) dan realisasi triwulan I 2018 Rp17,89 triliun (<https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/siaran-pers/keterangan-pers-akselerasi-kinerja-semakin-positif-dan-terkendali-penerimaan-pajak-kepabeanan-dan-cukai-meningkat-pesat/>)

Grafik II.3 Realisasi Penerimaan Cukai KPP BC Yogyakarta Lingkup Provinsi DIY Tahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber : Data SPAN (Diolah) Diakses Tanggal 01 Mei 2018

Grafik II.4 Realisasi Penerimaan Pajak Lainnya Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi DIY s.d Trw I Tahun 2018 (dalam Miliar Rupiah)



Sumber : Data SPAN (Diolah) Diakses Tanggal 01 Mei 2018

d. Pajak lainnya

Perolehan pajak lainnya di DIY sebesar Rp18,93 miliar atau tercapai 17,86 persen dari target sebesar Rp105,94 miliar. Penerimaan tersebut didominasi oleh Kota Yogyakarta 66,08 persen atau sebesar Rp12,50 miliar.

Penerimaan Pajak DIY Lampau Angka Nasional

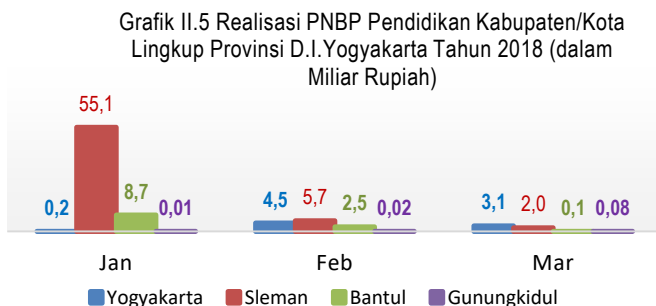
Sampai dengan awal April 2018 (10 April 2018), penerimaan pajak di Kanwil DJP DIY mencapai Rp1,08 triliun atau 19,67 persen dari total target penerimaan Rp5,48 triliun. Penerimaan pajak DIY tersebut tumbuh 9,85 persen dan lebih tinggi dari angka penerimaan nasional yang sebesar 18,50 persen. Pajak di DIY masih mengandalkan penerimaan dari perdagangan besar, konstruksi, jasa keuangan dan pemerintah. Potensi UKM di DIY cukup besar, namun tidak berkontribusi besar terhadap penerimaan pajak sebab UKM hanya dikenakan pajak 1 persen.

Sumber : http://kriogja.com/web/news/read/63029/Penerimaan_Pajak_DIY_Lebih_Tinggi_dari_Nasional

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sampai dengan triwulan I 2018, realisasi PNBPNP sebesar Rp485,5 miliar (18,98 persen target), yang terdiri dari PNBPNP Lainnya Rp202,59 miliar dan Pendapatan BLU Rp282,92 miliar. Penyumbang terbesar PNBPNP lainnya berasal dari :

a. Pendapatan PNBPNP Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi



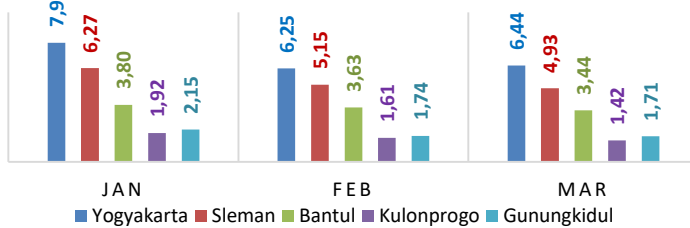
Sumber : Data SPAN (Diolah) Diakses Tanggal 01-05-2018

Realisasi penerimaan Pendapatan Pendidikan sebesar Rp82,11 miliar. Kontributor terbesar adalah Kabupaten Sleman yang mencapai Rp62,86 Miliar (75,87 persen). Penerimaan tertinggi terjadi pada bulan Januari berasal dari pendapatan

biaya pendidikan di Universitas Pembangunan Negeri (UPN) Veteran Yogyakarta sebesar Rp53,68 miliar.

b. Pendapatan PNBP Administrasi dan Penegakan Hukum

Grafik II.6 Realisasi PNBP Administrasi & Hukum Kabupaten/Kota Lingkup Provinsi D.I Yogyakarta Tahun 2018 (Dalam Miliar Rupiah)



Sumber : DATA SPAN (DIOLAH) Diakses Tanggal 01 Mei 2018

Realisasi penerimaan PNBP ini sebesar Rp58,43 miliar, yang berasal dari pendapatan BPKB. Penerimaan terbesar dari Kota Yogyakarta Rp20,66 miliar (35,35 persen), sehingga diperkirakan pertumbuhan jumlah kendaraan terbanyak di Kota Yogyakarta.

UU PNBP Direvisi Agar K/L Tak Berlomba Buat BLU

Pemerintah dan DPR memulai pembahasan revisi UU No.20/1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (23 Januari 2018). Sejumlah poin krusial masuk dalam revisi tersebut. Terkait tarif, RUU PNBP akan memberikan wewenang kepada menteri untuk menentukan tarif PNBP di instansinya melalui peraturan menteri. RUU PNBP juga memperluas obyek pungutan non pajak. Selain itu RUU PNBP juga memperluas opsi keringanan berupa pengurangan dan pembebasan PNBP jika menghadapi kondisi kahar, diputus pailit pengadilan, dan kesulitan likuiditas. Menkeu Sri Mulyani menegaskan, rancangan revisi UU PNBP akan memperketat pengelolaan BLU milik kementerian, agar K/L tidak berlomba-lomba membuat BLU dan mengenakan charge. Masyarakat tidak mampu akan terbebas dari PNBP.

Sumber : [http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/01/24/uu-penerimaan-negara-bukan-pajak-direvisi-pungutan-di-luar-](http://www.tribunnews.com/bisnis/2018/01/24/uu-penerimaan-negara-bukan-pajak-direvisi-pungutan-di-luar)

3. Pendapatan Hibah

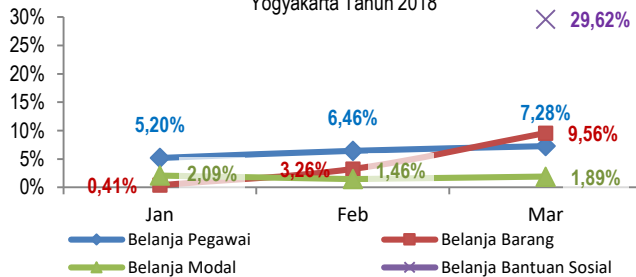
Selama periode triwulan I tahun 2018 **belum ada** pendapatan hibah di lingkup provinsi D.I. Yogyakarta.

B. BELANJA NEGARA

Belanja Negara lingkup Provinsi DIY terdiri dari belanja pemerintah pusat serta transfer ke daerah dan Dana Desa, dengan realisasi selama triwulan I 2018 sbb :

1. Belanja Pemerintah Pusat

Grafik II. 7 Grafik Tren Realisasi Belanja Pegawai , Belanja Barang, Belanja Modal, dan Belanja Bantuan Sosial Lingkup Provinsi D.I. Yogyakarta Tahun 2018



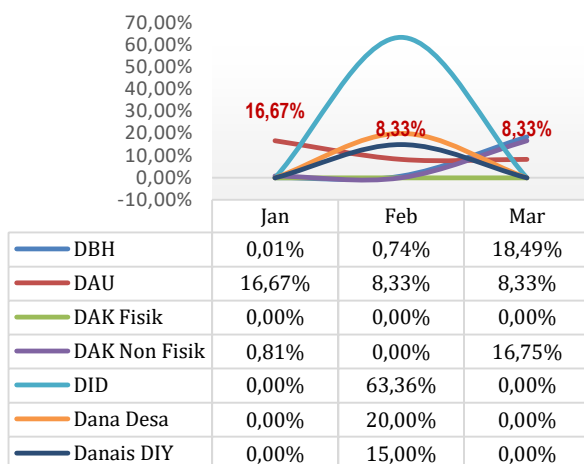
Sumber: Data Laporan GFS, Manev PA (Diolah)

Realisasi anggaran belanja pemerintah pusat di DIY mencapai Rp1,43 triliun atau 15,24 persen dari pagu yang ditetapkan sebesar Rp9,41 triliun. Tingkat penyerapan tersebut lebih tinggi dibandingkan

penyerapan tahun sebelumnya (12,77 persen). Komposisi tingkat penyerapan berdasarkan jenis belanja adalah yang tertinggi Belanja Bantuan Sosial 37,66 persen, Belanja Pegawai 19,39 persen, Belanja Barang 15,01 persen, dan terendah Belanja Modal 7,06 persen.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Grafik II.8 Tren Realisasi dana Transfer Daerah dan Dana Desa Lingkup Provinsi DIY Tahun 2018



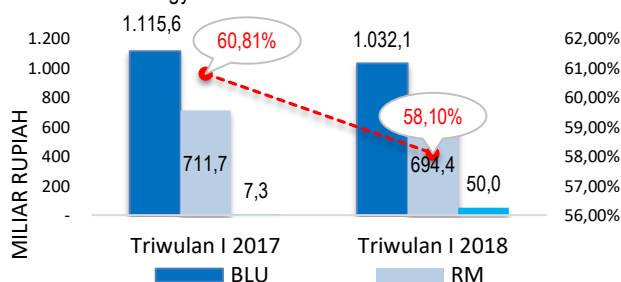
Sumber : Data OM SPAN Diakses Tanggal 07 Mei 2018

Penyaluran TKDD pada triwulan I 2018 terbesar berupa DAU sebesar 33,33 persen dari alokasi, berikutnya berupa DID sebesar 25,98 persen, Dana Desa 20 persen, DBH 19,23 persen, Dana Keistimewaan DIY 15 persen, dan DAK (berupa DAK Non Fisik) 13,84 persen. Dana Desa Tahap I sebesar 20 persen telah disalurkan di DIY, sedangkan untuk DAK Fisik Tahap I belum disalurkan (paling lambat bulan Juli 2018).

3. Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU)

Sampai dengan triwulan I 2018 jumlah pagu keseluruhan untuk satker BLU di Provinsi DIY sebesar Rp1,03 triliun. Jumlah tersebut menurun 7,49 persen dibanding tahun 2017 yang sebesar Rp1,12 triliun. Berdasarkan data pada grafik II.9, tampak bahwa pagu Rupiah Murni (RM) mengalami penurunan, sedangkan pagu BLU mengalami peningkatan, sehingga indeks kemandirian BLU juga mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan BLU di DIY semakin membaik.

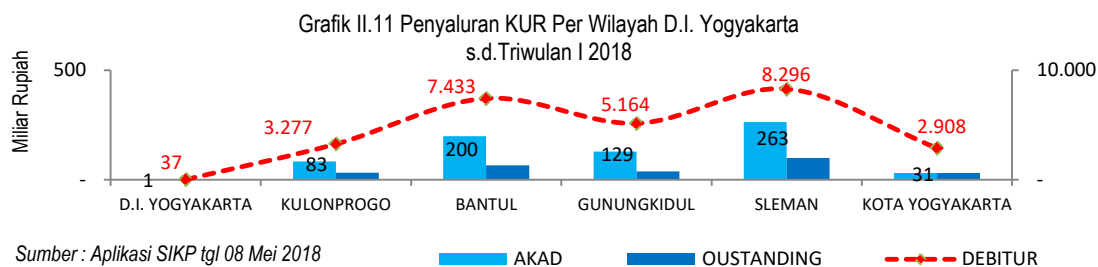
Grafik II.9 Perbandingan Pagu BLU Pusat Provinsi D.I. Yogyakarta Triwulan I Tahun 2017-2018



Sumber : Web Monev PA

4. Manajemen Investasi Pusat

Realisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) adalah Rp706,96 miliar dengan jumlah debitur sebanyak 27.115 debitur. Penyaluran terbesar di Kabupaten Sleman yaitu Rp263,08 miliar (8.296 debitur).



C. PROGNOSIS REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan pada APBN triwulan I tahun 2018 lingkup DIY 18,18 persen, meningkat dibandingkan periode yang sama tahun 2017 (15,88 persen). Dari sisi pengeluaran, belanja negara pada triwulan I tahun 2018 mencapai 20,57 persen, relatif sama dengan tahun 2017 (20,70 persen). Dari sisi eksternal APBN, BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi DIY tahun 2018 berada di kisaran 5,2-5,6% (yoy), meningkat dibandingkan tahun 2017 (5,26%). Inflasi keseluruhan tahun 2018 diperkirakan masih berada dalam kisaran target inflasi $4 \pm 1\%$ (yoy). Kondisi kedua faktor diatas diperkirakan akan berpengaruh secara positif terhadap capaian pendapatan negara pada sampai dengan akhir triwulan IV tahun 2018.

Berbagai kebijakan pemerintah terkait APBN 2018 seperti kebijakan untuk meningkatkan basis pajak dan mencegah praktik penghindaran pajak melalui *Automatic Exchange of Information (AEOI)*, memberikan insentif perpajakan seperti *tax holiday* dan *tax allowance* untuk meningkatkan potensi pajak dan menyempurnakan peraturan (revisi UU PNB dan PP tentang jenis dan tarif PNB) pada sisi pendapatan, diperkirakan akan meningkatkan kinerja APBN di tahun 2018. Dari sisi belanja, pemerintah konsisten untuk melanjutkan kebijakan efisiensi belanja, khususnya belanja nonprioritas dan juga belanja operasional.

Memperhatikan data realisasi Triwulan I 2018, *trend* capaian realisasi APBN di DIY sejak tahun 2012, dan memperhatikan berbagai faktor yang mempengaruhi capaian kinerja APBN diatas, prognosis APBN sampai dengan triwulan IV 2018 disusun sebagai berikut:

Tabel II.2 Perkiraan Realisasi APBN Lingkup Provinsi D. I. Yogyakarta s.d. Triwulan IV Tahun 2018

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan IV	
		Rp	% Realisasi Terhadap Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi Terhadap Pagu
Pendapatan Negara	8.047,48	1.462,98	15,88%	7.680,68	95,44%
Belanja Negara	19.382,89	3.986,93	20,57%	18.225,52	94,02%
Surplus/Defisit	-11.335,41	-2.525,95	22,26%	-10.554,84	93,11%

Bab III

Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan APBD

APBD merupakan salah satu mesin pendorong pertumbuhan ekonomi di daerah dan penentu tercapainya target dan sasaran makro ekonomi daerah yang diarahkan untuk mengatasi berbagai kendala dan permasalahan pokok yang merupakan tantangan dalam mewujudkan agenda pemerintah untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan mandiri. Adapun realisasi APBD lingkup D.I Yogyakarta adalah sebagai berikut :

Tabel III.1 Realisasi APBD Lingkup Provinsi DIY
s.d. Akhir Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam miliar Rp)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN	14.134,15	3.555,82	14.699,34	3.519,25
PAD	3.513,80	806,64	3.883,97	1.077,73
Pajak Daerah	2.446,08	556,17	2.614,49	656,34
Retribusi Daerah	179,77	39,32	192,44	36,84
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	173,84	0,26	188,08	145,35
Lain-Lain PAD yang Sah	714,11	210,90	888,97	239,21
Pendapatan Transfer	10.451,43	.2721,45	10.512,55	2.419,43
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	8.549,63	2.501,58	8.379,47	2.183,43
Dana Bagi Hasil Pajak	356,99	98,71	369,26	68,85
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	8,73	1,08	2,04	1,30
Dana Alokasi Umum	5.916,56	1.890,04	5.595,71	1.783,27
Dana Alokasi Khusus	2.267,35	511,76	2.412,47	330,01
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya	1.314,20	219,87	1.507,86	236,00
Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0	0
Dana Keistimewaan	800,00	104,27	1.000	123,44
Dana Penyesuaian	514,20	115,60	507,86	112,57
Transfer Pemerintah Provinsi	587,60	0,00	625,21	0
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	587,60	0,00	625,21	0
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya	0,00	0,00	0	0
Transfer Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0	0
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya	0,66	0,00	0,66	0
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	168,92	27,73	302,82	22,09
Pendapatan Hibah	36,41	1,79	145,93	2,25
Pendapatan Dana Darurat	0,00	0,00	0	0
Pendapatan Lainnya	132,51	25,94	156,89	19,84
JUMLAH PENDAPATAN	14.134,15	3.555,82	14.699,34	3.519,25
BELANJA	14.003,09	1.623,06	14.228,74	1.602,86
Belanja Pegawai	6.127,06	916,20	6.189,96	892,70

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
Belanja Barang	3.450,88	361,40	3.804,47	396,76
Belanja Bunga	3,73	0,65	2,35	0,46
Belanja Subsidi	0,00	0,00	0	0
Belanja Hibah	837,09	124,26	901,90	126,65
Belanja Bantuan Sosial	195,21	18,30	72,12	0,87
Belanja Bantuan Keuangan	627,47	48,74	375,99	0
Belanja Modal	2.703,88	153,42	2.824,68	185,25
Belanja Tidak Terduga	57,77	0,08	57,28	0,18
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	796,64	0,35	1.272,21	101,55
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	680,87	0,35	719,44	5,15
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	673,57	0,35	714,34	4,85
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	7,30	0,00	5,10	0,30
Transfer Bantuan Keuangan	115,77	0,00	552,77	96,39
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	111,73	0,00	81,27	28,75
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	1,61	0,00	469,07	67,64
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	2,43	0,00	2,43	0
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	14.799,73	1623,41	15.500,95	1.704,40
SURPLUS/DEFISIT	(665,57)	1932,41	(801,61)	1.814,85

Sumber: GFS, LRA Kab/Kota/Prov D.I Yogyakarta 2017& 2018 (Diolah)

Realisasi pendapatan seluruh pemerintah daerah di DIY sampai dengan triwulan I 2018 sebesar Rp3,52 Triliun atau 23,94 persen dari pagu. Secara persentase, jumlah tersebut menurun dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 yang mencapai 25,16 persen. Sementara itu realisasi belanja dan transfer mencapai Rp1,70 triliun (11,00 persen), hampir sama dengan realisasi triwulan I 2017 yang sebesar 10,97 persen. Selama triwulan I 2018, anggaran pemerintah daerah di DIY tercatat mengalami surplus sebesar Rp1,81 triliun.

A. Pendapatan Daerah

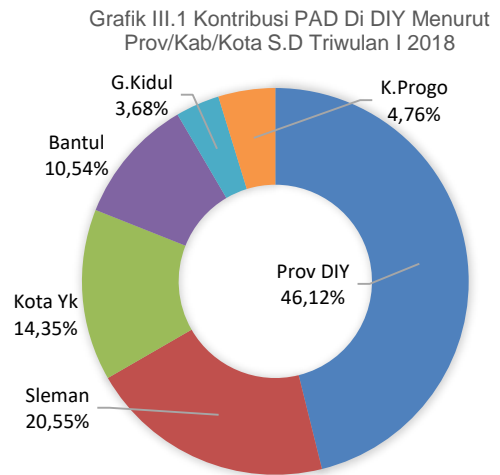
Realisasi Pendapatan Daerah masih didominasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2,42 triliun (68,75 persen), PAD sebesar Rp1,07 triliun (30,62 persen) dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebesar Rp22,08 miliar atau 0,63 persen.

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Realisasi penerimaan PAD sampai dengan triwulan I 2018 (Rp1,07 triliun) meningkat 33,60 persen atau Rp271,09 miliar jika dibandingkan triwulan I 2017. Penerimaan PAD terbesar (60,90 persen) berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp 656,34 miliar, 22,20 persen berasal dari Lain-lain PAD yang Sah, 13,49 persen

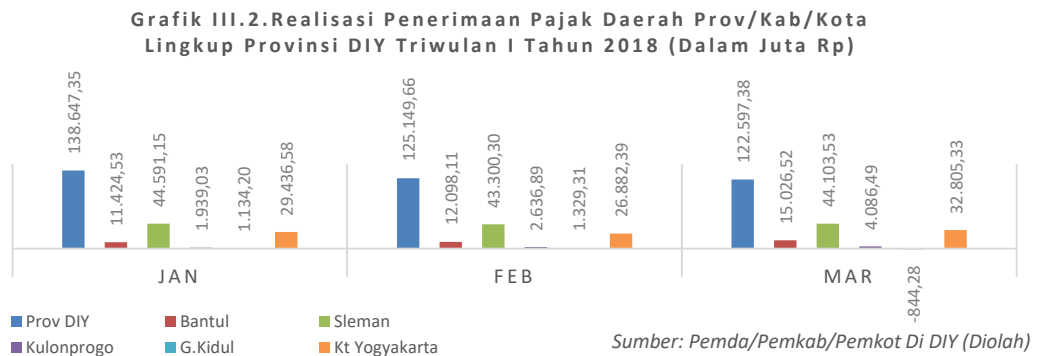
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dan 3,42 persen dari Pendapatan Retribusi Daerah.

Berdasarkan wilayahnya, kontribusi PAD tertinggi berasal dari Provinsi DIY sebesar 46,12 persen. Dari realisasi PAD tersebut dapat diketahui rasio PAD (terhadap total pendapatan daerah) sebesar 30,62 persen yang menunjukkan tingkat desentralisasi fiskal atau kemampuan keuangan daerah untuk membiayai belanja pemerintahan termasuk kategori cukup. Sementara rasio dana transfer (terhadap total pendapatan daerah) sebesar 68,75 persen yang menunjukkan ketergantungan keuangan daerah sangat tinggi¹. Perkembangan penerimaan daerah pembentuk struktur PAD di D.I Yogyakarta sampai dengan triwulan I 2018 adalah sebagai berikut:



a) Penerimaan Pajak Daerah

Penerimaan pajak daerah lingkup Provinsi DIY per Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

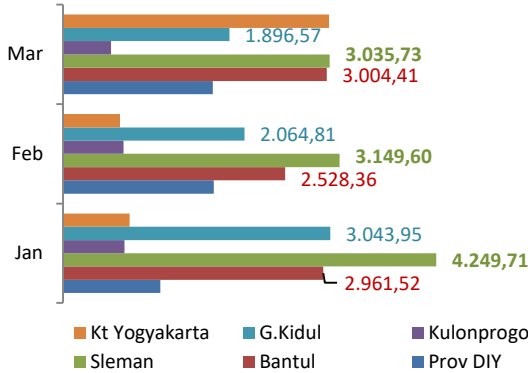


Pajak Daerah terdiri atas Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten/ Kota. 58,87 persen atau Rp386,39 miliar dari penerimaan Pajak Daerah di DIY berasal dari Pajak Provinsi (antara lain: Pajak Kendaraan Bermotor, dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor). Sedang untuk penerimaan pajak kabupaten (antara lain: Pajak Hotel, dan Pajak reklame) terbesar ada di Kabupaten Sleman sebesar Rp131,99 miliar atau mencapai 20,11 persen.

¹ Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991 dalam Bisma (2010) diunduh dari <http://sappilpil.blogspot.co.id/2015/12/mengukur-kemampuan-keuangan-suatu-daerah.html>

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Grifik III.3. Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah Prov/Kab/Kota Lingkup Provinsi DIY Triwulan I Tahun 2018 (dalam Juta Rp)



Objek retribusi daerah adalah jasa umum, jasa usaha, dan perizinan tertentu. Sepanjang triwulan I 2018, retribusi daerah terbesar berasal dari Kabupaten Sleman sebanyak Rp10,43 miliar atau 28,32 persen, kemudian Kabupaten Bantul (23,06 persen) dan Kabupaten Gunungkidul (19,02 persen).

c) Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan lingkup Provinsi DIY per Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

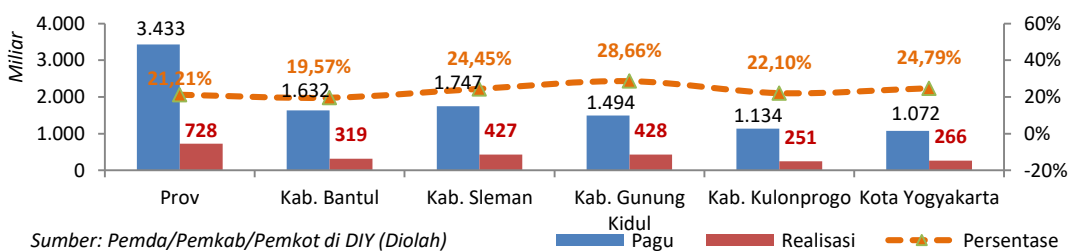
Grifik III.4. Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Prov/Kab/Kota Lingkup Provinsi DIY Triwulan I Tahun 2018 (dalam Juta Rp)

	Jan	Feb	Mar
Prov DIY	0,00	0,00	79.201.315.077,80
Bantul	0,00	0,00	15.755.330.305,03
Sleman	0,00	0,00	23.014.970.381,43
Kulonprogo	0,00	0,00	9.209.094.086,50
Kt Yogyakarta	0,00	0,00	18.169.713.459,02

Penerimaan ini berasal dari bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, BUMN, Perusahaan Swasta dan Lembaga Keuangan Non Bank (BUKP). Penerimaan terbesar pada pos ini adalah Provinsi DIY sebesar Rp79,2 miliar atau 54,48 persen dari total penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan di DIY.

2. Pendapatan Transfer

Grifik III.5 Pagu dan Realisasi Pendapatan Transfer periode Triwulan I 2018 per Prov/Kab/Kota di DIY



Sumber: Pemda/Pemkab/Pemkot di DIY (Diolah)

Pendapatan transfer seluruh Pemda di DIY pada triwulan I 2018 mencapai Rp2,41 triliun atau meningkat 10,37 persen dibandingkan triwulan I 2017.

Pada triwulan I tahun 2018 seluruh pendapatan transfer berasal dari transfer pemerintah. Transfer pemerintah pusat terbesar berupa DAU sebesar 73,71 persen, DAK 13,64 persen dan Dana Keistimewaan 5,10 persen dari total pendapatan transfer.

Dana Keistimewaan DIY Tahun 2018 Meningkat jadi Rp 1 T

Dana Kesitimewaan (Danais) yang diberikan untuk Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) tahun 2018 ini mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya. Danais tahun 2018 meningkat menjadi Rp 1 triliun dari sebelumnya Rp 800 miliar. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) yang diserahkan untuk kementerian/lembaga di wilayah DIY tahun 2018 berjumlah 365 DIPA dengan nilai Rp 10.72 triliun. Untuk instansi vertikal sebanyak 310 DIPA dengan nilai Rp 10,5 triliun, dan DIPA yang dialokasikan untuk berbagai SKPD sebanyak 55 DIPA dengan nilai Rp 222,6 miliar.

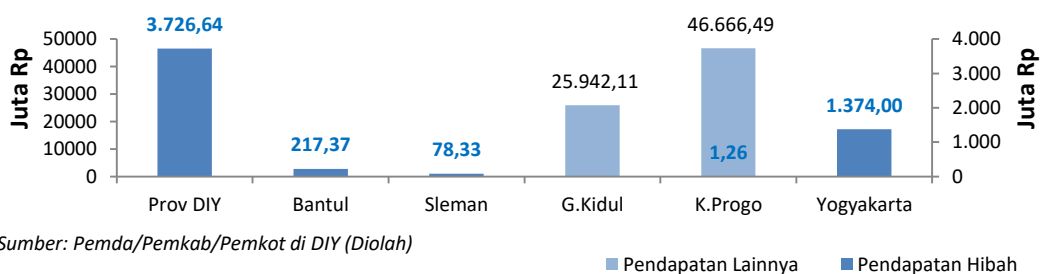
Alokasi Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang merupakan DIPA bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA BUN) sebagai dasar penyaluran dana transfer ke Daerah dan Dana Desa kepada pemerintah daerah senilai Rp 9,98 triliun. Adapun rinciannya, Dana Perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana ALokasi Khusus (DAU) sebesar Rp 8,38 triliun, Dana insentif Daerah (DID) sebesar Rp 236,75 miliar. secara total dana APBN Tahun Anggaran 2018 yang dialokasikan di lingkungan Provinsi DIY sebsar Rp 20,70 triliun. Jumlah ini mengalami kenaikan sebesar Rp 1,18 triliun atau 6,02 persen dibanding tahun anggaran 2017.

Sumber: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3768510/dana-keistimewaan-diy-tahun-2018-meningkat-iarli-m-1-t>

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan yang sah dianggarkan sebesar Rp 888,97 miliar dan sampai dengan triwulan I 2018 mencapai Rp239,21 miliar. Kabupaten penyumbang lain-lain pendapatan daerah terbesar adalah Sleman sejumlah Rp56,03 miliar yang berasal dari pendapatan lainnya.

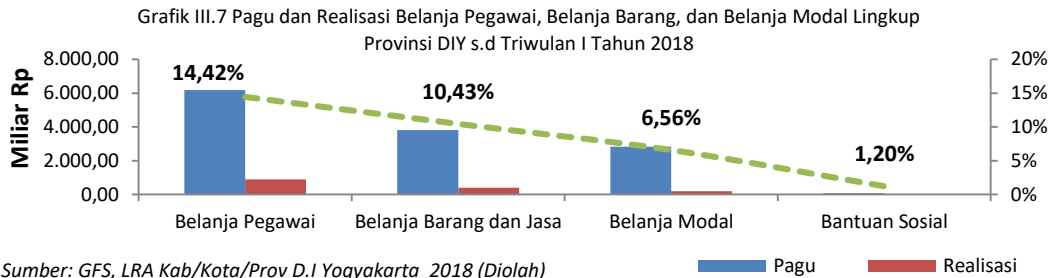
Grafik III.6 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah menurut Prov/Kab/Kota di DIY s.d Triwulan I 2018



Sumber: Pemda/Pemkab/Pemkot di DIY (Diolah)

B. Belanja Daerah

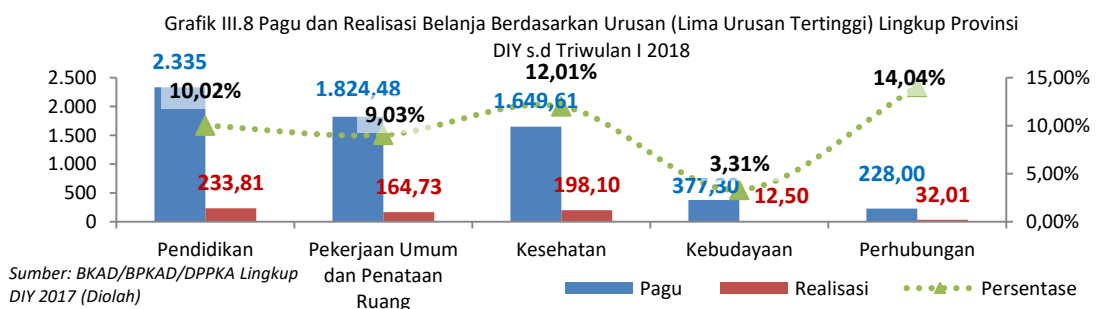
1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal



Alokasi belanja pegawai, belanja barang, dan belanja modal berturut turut adalah 43,5 persen, 26,74 persen, dan 19,85 persen dari total belanja daerah tahun 2018. Dari sisi kinerja penyerapan, sampai dengan triwulan I 2018 ini, anggaran belanja DIY terserap sebesar 11,26 persen (Rp1,6 triliun) dari pagu anggaran. Realisasi belanja modal pada triwulan I 2018 masih minim yaitu 6,56 persen, padahal belanja modal bisa menjadi stimulan Bergeraknya investasi swasta sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Sedangkan realisasi belanja barang dan bantuan sosial masing-masing 10,43 persen dan 1,2 persen dari realisasi belanja daerah.

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Alokasi terbesar belanja daerah berdasarkan urusan (selain *Urusan Administrasi Pemerintahan dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan*) adalah pendidikan sebesar 22,79 persen, selanjutnya pekerjaan umum dan penataan ruang yang mendapatkan alokasi 17,81 persen, kesehatan 16,11 persen, kebudayaan 3,68 persen dan perhubungan 2,23 persen . Alokasi tersebut sesuai dengan prioritas pembangunan daerah DIY pada tahun 2018 yang meliputi peningkatan kualitas SDM, pengembangan ekonomi, ketahanan energi dan pangan, sosial budaya, infrastruktur, pembangunan wilayah dan reformasi birokrasi.



C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

Berdasarkan analisis trend selama kurun Tahun 2012-2017, perkiraan pendapatan daerah dan belanja daerah sampai dengan akhir Tahun 2018 adalah sebagai berikut

Tabel III.2 Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi DIY s.d. Akhir Triwulan IV Tahun 2018 (dalam miliar Rp)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d Tw I 2018		Perkiraan Realisasi s.d Tw IV 2018	
		Rp	% Realisasi Thd Pagu	Rp	% Realisasi Thd Pagu
PENDAPATAN DAERAH	14.699,34	3.519,25	23,94	15.329,22	104,29
BELANJA DAERAH DAN TRANSFER	15.500,95	1.704,40	10,99	13.961,01	90,07
SURPLUS/DEFISIT	(801,61)	1.814,85	-226,40	1.368,21	-170,68

Sumber: LKPD Pemda (2012-2017) Diolah

BI memandang perekonomian DIY pada 2018 tetap optimistis dan prospektif. Hal ini didasarkan tren sumber-sumber pertumbuhan ekonomi DIY yang diperkirakan tumbuh lebih tinggi, seiring dengan penguatan momentum perekonomian global dan nasional. Investasi yang terkait dengan bisnis pariwisata dan juga sektor-sektor prospektif seperti konstruksi dan infokom serta industri pengolahan makan minum akan menjadi motor penggerak perekonomian Jogjakarta. Dari sisi faktor pengeluaran Pemerintah Daerah, APBD DIY di 2017 memiliki daya serap yang cukup baik. Realisasi belanja DIY relatif lebih tinggi dibandingkan dengan provinsi-provinsi di wilayah Jawa. Bank Indonesia meyakini bahwa perekonomian DIY diperkirakan akan tumbuh pada level 5,2-5,6 persen di tahun 2018 dengan dorongan konsumsi yang terus meningkat, diikuti dengan kemampuan investasi di sektor-sektor pendorong pariwisataⁱ.

ⁱⁱ <https://www.ucnews.id/news/Perekonomian-DIY-2018-Dinilai-Prospektif/4260184444833141.html>

Bab IV

Perkembangan dan Analisis Pelaksanaan Anggaran Konsolidasian (APBN dan APBD)

A. LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KONSOLIDASIAN

Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian (LKPK) adalah laporan yang disusun berdasarkan konsolidasi Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Konsolidasian dalam periode tertentu.

Tabel IV.1. Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian
Tingkat Wilayah Provinsi DIY Triwulan I Tahun 2018 (dalam Juta Rupiah)

Uraian	Triwulan I 2018				Trw I 2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan	Konsolidasi
A. Pendapatan dan Hibah	4.016.054,78	3.519.252,27	4.982.232,07	178,11%	1.791.447,74
I. Pendapatan Perpajakan	977.476,35	656.340,62	1.633.816,98	20,87%	1.351.762,09
II. Pendapatan Bukan Pajak	485.503,45	441.229,18	906.896,46	106,26%	439.685,65
III. Hibah	0	2.250,07	0	-	0
IV. Transfer	2.553.074,98	2.419.432,40	2.441.518,63	-	0
B. Belanja Negara	3.986.937,16	1.704.404,92	3.138.267,10	9,17%	2.874.537,56
I. Belanja Pemerintah	1.433.862,18	1.602.859,04	3.036.721,22	7,09%	2.835.706,98
II. Transfer	2.553.074,98	101.545,88	101.545,88	161,51%	38.830,58
Surplus/(Defisit)	29.117,62	1.814.847,35	1.843.964,97	-	(1.083.089,82)
Pembiayaan	0	407.549,46	407.549,46	-	(25.901,34)
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0	417.897,45	417.897,45	-	268,66
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	10.347,99	10.347,99	-60,46%	26.170,00
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	29.117,62	2.222.396,81	2.251.514,43	-	(1.108.991,16)

Catatan: Seluruh Pengeluaran Transfer pemerintah pusat dieliminasi dengan Penerimaan Transfer Pemerintah Daerah.
Sumber: Laporan Government Financial Statistic (GFS) Trw I 2017 dan Trw I 2018 Kanwil DPJb Provinsi DIY

B. PENDAPATAN KONSOLIDASIAN

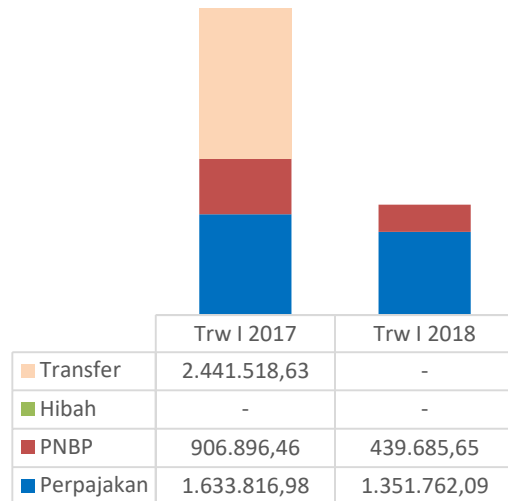
Selama triwulan I 2018, realisasi pendapatan konsolidasian tingkat wilayah DIY sebesar Rp4,98 Triliun, secara administrative meningkat sebesar 178,11 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1,79 Triliun. Hal ini karena di tahun 2018 ini pengeluaran transfer pemerintah tercatat sebagai pendapatan pemerintah daerah.

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

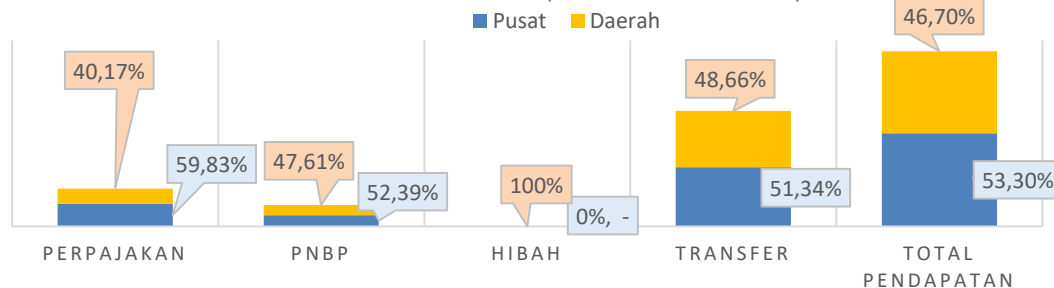
Realisasi Pendapatan pemerintah konsolidasian sebesar Rp4,98 Triliun tersebut terdiri atas penerimaan perpajakan sebesar Rp1,63 Triliun, PNBPN sebesar Rp906,9 Miliar, dan pendapatan transfer sebesar Rp2,44 Triliun.

Diluar pendapatan transfer, sampai dengan triwulan I 2018, meski masih mendominasi komposisi Pendapatan Konsolidasian, namun kontribusi pendapatan pajak konsolidasian yang sebesar 64,31 persen ini tercatat menurun dibanding capaian Triwulan I 2017 yang sebesar 75,46 persen. Disisi lain, proporsi PNBPN Konsolidasian justru mengalami kenaikan yang cukup signifikan yaitu sebesar 11,15 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya keras dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PNBPN semakin menunjukkan perkembangan yang menggembirakan.

Grafik IV.1. Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi DIY Trw I 2017 dan Trw I 2018 (dalam Juta Rupiah)



GRAFIK IV.2. PERBANDINGAN KOMPOSISI PENDAPATAN KONSOLIDASIAN DI PROVINSI DIY TRW I 2018 (DALAM JUTA RUPIAH)



SUMBER DATA : LAPORAN (GFS) TRI I TAHUN 2018 KANWIL DJPB PROVINSI DIY (DIOLAH)

Grafik IV.2 menjelaskan bahwa rata-rata kontribusi pendapatan pemerintah pusat yang mencapai 53,30 persen terhadap pendapatan konsolidasian masih lebih besar dibanding pendapatan pemerintah daerah (46,70 persen).

2. Analisis Perubahan

Tidak terdapat perubahan yang berarti pada struktur penerimaan konsolidasian triwulan I 2018. Meski hanya mengalami kenaikan sebesar Rp102,91 miliar (2,06 persen) di banding periode triwulan I 2017, sektor perpajakan masih menjadi tulang punggung struktur penerimaan di DIY. Sementara itu PNBPN tercatat meningkat sebesar Rp404,43 miliar (19,94 persen) dan Hibah sebesar Rp4,44 miliar (43,78 persen). Kenaikan PNBPN tersebut ditengarai antara lain karena kenaikan biaya pengurusan STNK dan BPKB (Jasa Kepolisian) dan penerimaan biaya pendidikan.

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kenaikan Realisasi Pendapatan Konsolidasian

Tabel IV.2.
Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di wilayah Provinsi DIY Triwulan I 2018

Uraian	Realisasi Trw I 2017	Realisasi Trw I 2018	%
Penerimaan Perpajakan	1.351.762.089.889	1.633.816.977.824	20,87%
PNBP	439.685.650.122	3.348.415.095.640	661,55%
Total	1.791.447.740.011	4.982.232.073.284	178,11%
PDRB ADHB /Pert. Ekonomi	28.739.416.000.000	31.139.302.000.000	5,36%

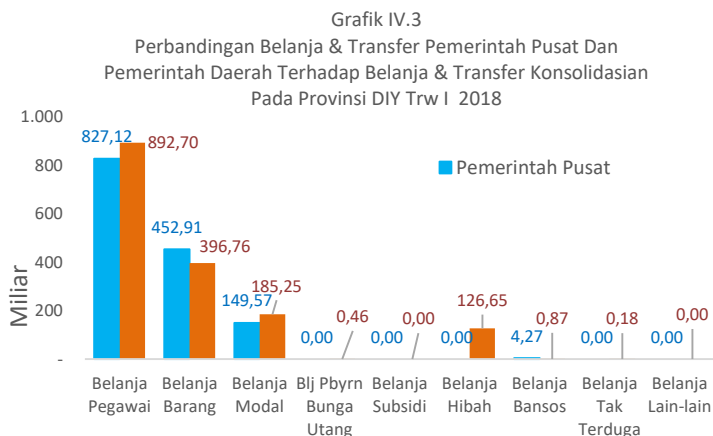
Sumber Data : Laporan GFS Trw I Tahun 2017 dan Trw I Tahun 2018 Kanwil DJPb Provinsi DIY (Diolah)

Seiring dengan pertumbuhan pendapatan, pertumbuhan ekonomi DIY triwulan I 2018 mampu tumbuh sebesar 5,36 persen. Secara umum, meskipun *tidak terlalu signifikan* pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Provinsi DIY berpengaruh positif terhadap kenaikan pendapatan konsolidasian, terutama penerimaan PNBP.

C. BELANJA KONSOLIDASIAN

Belanja Konsolidasian Tingkat Wilayah adalah konsolidasian antara seluruh belanja Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah suatu wilayah dalam satu periode pelaporan yang sama

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan



Pada triwulan I 2018, realisasi belanja dan transfer konsolidasian mencapai Rp3,14 triliun. Dari besaran tersebut, sebesar Rp1,70 triliun (54,31 persen) merupakan belanja pemerintah daerah dan Rp1,43 triliun (45,69 persen) merupakan belanja pemerintah pusat.

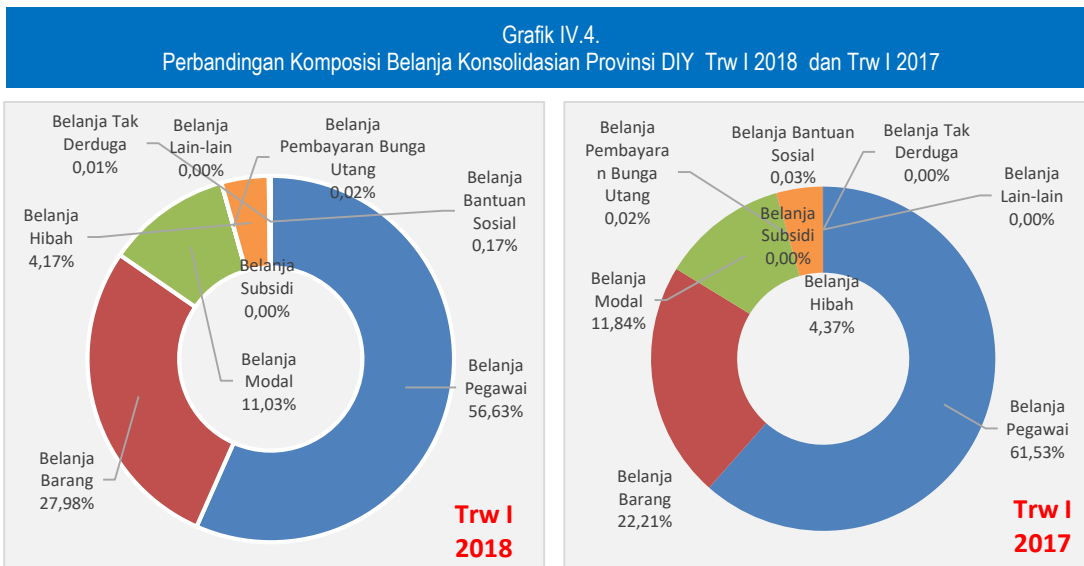
Realisasi Belanja Pegawai konsolidasian mencapai Rp1,72 triliun, dimana Rp892,70 miliar (51,91 persen) berasal dari APBD dan Rp827,12 miliar (48,09 persen) berasal dari APBN. Sementara itu belanja barang konsolidasian mencapai Rp849,67 miliar dengan komposisi 46,70 persen dari pemerintah daerah dan 53,30 persen dari pemerintah pusat. Sedangkan Belanja Modal konsolidasian baru

mencapai Rp334,82 miliar dengan komposisi 55,33 persen berasal dari APBD dan 44,67 persen dari APBN.

Jika ditinjau dari proporsi belanja APBN dan belanja APBD terhadap belanja konsolidasian, apabila dikaitkan dengan kontribusi pemerintah pada pertumbuhan ekonomi di wilayah Provinsi DIY khususnya dari sisi pengeluaran pemerintah, hal ini menunjukkan bahwa *kontribusi pemerintah daerah lebih besar dari pemerintah pusat, terutama nampak pada Belanja Modal. Belanja Modal merupakan bagian dari komponen Investasi pemerintah, yang dapat meningkatkan multiplier effect sehingga dapat menstimulus perekonomian di wilayah DIY.*

2. Analisis Perubahan

Dibanding periode yang sama tahun sebelumnya, secara *rerata* realisasi belanja pemerintah konsolidasian pada triwulan I 2018 mengalami peningkatan sebesar 7,09 persen. Pos belanja yang mengalami kenaikan terbesar adalah belanja bantuan sosial (naik 488,88 persen), belanja barang (naik 34,91 persen), dan belanja pembayaran bunga utang (naik 6,06 persen). Sedangkan Belanja pegawai dan belanja modal tercatat mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,43 persen dan 0,29 persen.



Sumber Data : LKPK Dan Statistik Keuangan Tingkat Wilayah, Kanwil DPJB Provinsi DIY Trw I 2018 dan Trw I 2017 (Diolah)

Jika dilihat dari *komposisinya* (Grafik IV.4), terjadi perubahan yang cukup signifikan terhadap realisasi belanja pegawai dan belanja modal. Realisasi belanja pegawai pada pada triwulan I 2017 yang sebesar 61,53 persen dari total realisasi belanja konsolidasian, *menurun* menjadi 56,63 persen pada triwulan I 2018. *Demikian juga dengan porsi Belanja Modal. Porsi pada pos belanja ini menurun*

dari 11,84 persen menjadi 11,03 persen. Sebaliknya, belanja barang yang semula sebesar 22,21 persen *meningkat* menjadi 27,98 persen.

3. Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional

Tabel IV.3.

Relevansi Pertumbuhan Belanja Konsolidasian dengan Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Kemiskinan dan Tingkat Pengangguran di wilayah Provinsi DIY

Belanja Konsolidasian	Realisasi Trw I 2017	Realisasi Trw I 2018	% Perubahan
Belanja Pemerintah (Miliar)	2.835.706,983	3.036.721,224	7,09%
PDRB ADHB (Miliar)/Pertumb.Ek	28.739,416	31.139,302	5,36%
Persentase Penduduk Miskin	13,10%	12,36%	-0,74%
Persentase TPT	2,84%	3,06%	0,22%

Sumber Data : Laporan GFS Kanwil DPJB Provinsi DIY Triwulan III 2016 dan Triwulan III I2016, BRS DIY No.65/11/34/Th.XIX Tgl 6 November 2017, (Diolah)

Peningkatan belanja pemerintah cukup mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di DIY. Kenaikan belanja pemerintah diikuti dengan peningkatan PDRB. Sedangkan korelasi antara tingkat belanja dengan tingkat kemiskinan adalah *negatif*, yang berarti ketika alokasi belanja ditingkatkan, maka tingkat kemiskinan akan menurun. Lebih lanjut, terhadap pengangguran (TPT), *idealnya* dengan peningkatan belanja pemerintah seharusnya angka TPT menurun, namun pada triwulan I ini justru meningkat. *Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka TPT tersebut, adalah hujan yang terlambat turun, yang menyebabkan masa tanam padi dan masa panen padi bergeser. Disamping itu, panen lebih banyak dilakukan dengan cara tebas, sehingga tidak terlalu menyerap tenaga kerja.*

D. ANALISIS KONTRIBUSI PEMERINTAH DALAM PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB)

Salah satu analisis data GFS adalah analisis kontribusi pemerintah pada PDRB. Kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dimaksud berasal dari belanja Pemerintah dan investasi. Nilai belanja pemerintah adalah total nilai dari kompensasi pegawai, penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap dan manfaat sosial yang dikurangi dengan nilai penjualan barang dan jasa. Sedangkan nilai Investasi Pemerintah (dalam Laporan Operasional sama dengan nilai Aset tetap pada Transaksi Aset Non Keuangan Neto)

Tabel IV.4.

Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Umum
Tingkat Wilayah Provinsi DIY Triwulan I 2017 dan Triwulan I 2018

Uraian	Triwulan I 2017	Triwulan I 2018
Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto		
Pendapatan	1.790.247.138.415	2.563.024.931.568
a. Pajak	1.351.762.089.889	1.634.059.860.364

Uraian	Triwulan I 2017	Triwulan I 2018
b. Kontribusi Sosial	0	0
c. Hibah	0	0
d. Pendapatan Lainnya	438.485.048.526	928.965.071.204
Beban	2.538.743.903.755	2.949.888.037.015
a. Kompensasi Pegawai	1.744.682.426.668	1.720.622.419.293
b. Penggunaan Barang dan Jasa	602.011.785.943	995.505.103.122
c. Konsumsi Aset Tetap	0	0
d. Bunga	434.344.421	460.648.680
e. Subsidi	0	0
f. Hibah	190.659.701.492	126.645.145.517
g. Manfaat Sosial	872.650.000	5.138.840.000
h. Beban Lainnya	82.995.231	101.545.880.403
Keseimbangan operasi bruto/neto	(748.496.765.341)	(386.845.477.355)
Transaksi Pada Aset Non Keuangan		
a. Aset Tetap	205.361.741.183	-
b. Perubahan Persediaan	0	-
c. Barang Berharga	0	-
d. Aset Non Produksi	129.231.316.814	-
Net Lending/Borrowing	(1.083.089.823.337)	-
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban	1.083.089.823.337	-
a. Akuisisi Neto Aset Keuangan	(1.084.259.823.337)	-
- Domestik	(1.084.259.823.337)	-
- Luar Negeri	0	-
b. Keterjadian Kewajiban Neto	(1.170.000.000)	-
- Domestik	(1.170.000.000)	-
- Luar Negeri	0	-
SILPA Konsolidasian	(1.108.991.162.570)	1.132.131.270.787

*Sumber Data : Laporan Government Finacial Statistic (GFS) Triwulan I 2017 dan Triwulan I 2018
Kanwil DJPb Provinsi DIY*

Berdasarkan LO pada tabel IV.4. diatas, **nilai belanja** yang dihitung dari akumulasi kompensasi pegawai, pengadaan barang dan Jasa, konsumsi aset tetap dan manfaat sosial **Pemerintah** selama triwulan I 2018 sebesar Rp2,72 triliun. Sehingga *kontribusi pemerintah terhadap PDRB DIY pada triwulan I 2018 (Rp31,14 triliun) sebesar 8,74 persen, sedikit meningkat jika* dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar 8,17 persen. Hal ini sejalan dengan komitmen pemerintah untuk mengoptimalkan seluruh potensi yang ada dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi, meski pemerintah tetap konsisten untuk melanjutkan kebijakan efisiensi belanja, khususnya belanja nonprioritas dan juga belanja operasional.

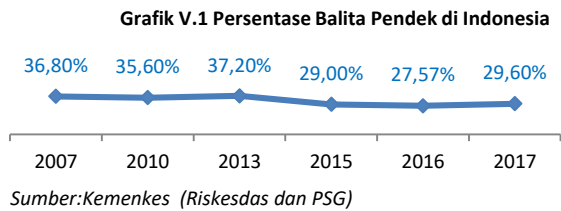
Sedangkan *kontribusi Pemerintah terhadap PDRB dari Investasi yang dihitung berdasarkan nilai asset tetap pada transaksi asset non keuangan netto selama triwulan I tahun 2018 ini belum dapat diketahui besarnya.* Namun demikian, sejumlah kebijakan telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi, antara lain pembebasan tax allowance dan tax holiday, kemudahan perizinan untuk memperkerjakan tenaga asing, khususnya para ahli dan kemudahan izin untuk melakukan impor mesin dan barang, baik untuk keperluan produksi maupun diperjualbelikan.

Bab V

Berita/ Isu Fiskal Regional Terpilih

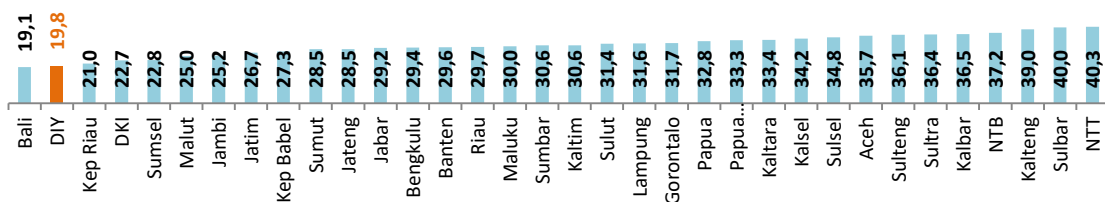
A. Tahun 2018, Prioritas Intervensi *Stunting* DIY di Kabupaten Kulon Progo

UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah mengamanatkan adanya alokasi anggaran kesehatan sebesar 5 persen dari belanja APBN dan 10 persen dari belanja APBD. Pada tahun 2018, anggaran sektor kesehatan dalam APBN 2018 meningkat 0,8 triliun dibandingkan tahun sebelumnya atau sebesar Rp111,0 triliunⁱ. Namun sekitar 37 persen atau hampir 9 juta anak balita di Indonesia (Riset Kesehatan Dasar/ Riskesdas Kemenkes RI Tahun 2013) mengalami *stunting* (kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis) dan Indonesia adalah negara dengan prevalensi *stunting* kelima terbesarⁱⁱ.



Persentase penderita *stunting* di DIY termasuk rendah dibandingkan provinsi lain di Indonesia, yaitu sebanyak 19,8 persen pada tahun 2017. Jumlah tersebut masih di bawah batasan WHO yang menyatakan jika prevalensi balita pendek sebesar 20 persen atau lebih akan menjadi masalah kesehatan masyarakatⁱⁱⁱ. Namun demikian kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan, sehingga perlu berbagai tindakan untuk mengantisipasi maupun menangani anak-anak *stunting*.

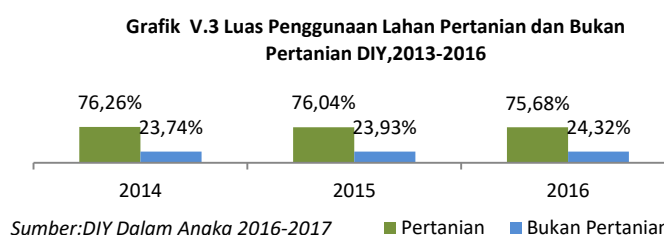
Grafik V.2 Persentase Balita Pendek Menurut Provinsi di Indonesia, 2017



Pada tahun 2018, pemerintah melaksanakan program intervensi *stunting* di 100 kabupaten/ kota prioritas. Kulonprogo menjadi salah satu daerah yang diintervensi karena dinilai memiliki kasus *stunting* yang cukup tinggi. Sekitar 496 balita di sepuluh desa di Kulon Progo akan mendapat intervensi penanggulangan *stunting* jangka pendek pada 2018. Fokus intervensi dan pemenuhan gizi akan diberikan pada 1.000 hari pertama kehidupan bayi. Hal itu berguna agar balita bisa terlepas dari *stunting*. Dinas Kesehatan Kulonprogo juga tengah menyusun strategi penanggulangan *stunting* yang komprehensif bersama dinas-dinas lainnya. Berdasarkan catatan Dinas Kesehatan Kulonprogo, Tahun 2017 terdapat 3.496 dari 25.111 balita yang dinyatakan *stunting*^{iv}.

B. NYIA Caplok 587 Ha Lahan Produktif, Pemda DIY Siapkan Cetak Sawah

Prioritas penganggaran APBN 2018 diarahkan untuk tiga sektor unggulan, yaitu pertanian, pariwisata, dan perikanan. Ketiga sektor tersebut memiliki fungsi strategis dari sisi ketahanan pangan, penciptaan kesempatan kerja dan kemampuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas^v. Sektor ketahanan pangan di DIY menghadapi tantangan yang serius diakibatkan menyusutnya lahan pertanian. Pembangunan New Yogyakarta International Airport (NYIA) dinilai menjadi salah satu sebab penyusutan lahan produktif di wilayah DIY, yaitu seluas 587 hektar^{vi}. Selain itu, alih fungsi lahan di wilayah lain, yang rata-rata mencapai 200 hektar per tahun. Adanya penurunan jumlah lahan pertanian tersebut akan menyebabkan setidaknya produksi padi DIY setiap tahun berkurang 1.000 ton^{vii}.



Kebutuhan pangan DIY yang mencapai 3600 ton per tahun masih dapat tercukupi dari hasil panen yang mendekati angka 5000 ton per tahun. Namun Pemda DIY telah mengantisipasi agar produksi pangan DIY tidak turun akibat pembangunan bandara baru dengan Program Cetak Sawah yang sudah ada di RPJMD 2017-2022. Pemda DIY akan mencetak sawah baru seluas 400 hektar di Kulon Progo mulai tahun 2019 dan Dinas Pertanian akan menjadi eksekutor dari program tersebut. Cetak lahan sawah baru diharapkan memiliki kualitas sebaik lahan lama, karena jika tidak, tetap berpengaruh terhadap ketersediaan pangan. Walaupun dalam jangka panjang, tingkat kesuburan dari lahan cetak sawah dapat ditingkatkan secara signifikan agar dapat menopang kebutuhan pangan masyarakat.

Selain cetak sawah, cara lain yang bisa dilakukan untuk mengurangi alih fungsi lahan pertanian, yaitu dengan mengefektifkan regulasi tentang perlindungan lahan pertanian. UU no 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan perlu ditindaklanjuti secara lebih intensif ke dalam Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten serta peraturan pelaksanaan lainnya. *Reward and punishment based policy* perlu diterapkan secara optimal dan konsekuen didalam menerjemahkan dan menerapkan amanat UU tersebut^{viii}.

ⁱ <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2018>

ⁱⁱ <http://www.tnp2k.go.id/images/uploads/downloads/Buku%20Ringkasan%20Stunting.pdf>

ⁱⁱⁱ <http://www.depkes.go.id/resources/download/pusdatin/infodatin/situasi-balita-pendek-2016.pdf>

^{iv} <http://jateng.metrotvnews.com/peristiwa/8KyvpoXN-10-desa-di-kulon-progo-bakal-diintervensi-kasus-stunting>

^v <http://www.indonesiadev.com/apbn-2018-pemerintah-prioritaskan-sektor-pertanian-perikanan-dan-pariwisata/>

^{vi} http://krjogja.com/web/news/read/55438/Bandara_NYIA_Gerus_Lahan_Produktif_Pemda_DIY_Siapkan_Cetak_Sawah

^{vii} <http://www.beritasatu.com/nasional/474284-pemprov-diy-dorong-program-pencetakan-sawah-baru.html>

^{viii} http://krjogja.com/web/news/read/56149/Lahan_Pertanian_Susut_Tak_Bisa_Dibiarkan_Ini_Ancaman